

ABSTRAK

Semangat demokratisasi yang marak sebagai buah dari reformasi yang digulirkan mahasiswa sejak pertengahan Mei 1998 disambut begitu antusias oleh segenap lapisan masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam berbagai sector kehidupan. Sector pendidikan sebagai bagian dari garapan dari pembangunan bangsa juga mendapatkan perhatian serius pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi pendidikan.

Dukungan daerah terhadap pentingnya desentralisasi pendidikan sebagai bentuk penolakan dari sistem pendidikan sentralistik yang cenderung terpusat dan kurang sukses, mendapatkan momentumnya bersamaan dengan ditabuhnya gendering otonomi daerah sejak awal Januari 2001.

Otonomi pendidikan dengan berbagai hal yang terkait dengannya, seperti manajemen berbasis sekolah (MBS), pendidikan berbasis masyarakat, bea siswa pendidikan, pemberdayaan kualitas guru, dan rehabilitasi sarana pendidikan, sejatinya diakomodasi oleh daerah. Karena diyakini akan dapat memajukan daerah setempat dimasa depan. Dalam konteks ini, pendidikan hendaknya dijadikan mascot pembangunan daerah dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap potensi masyarakat setempat untuk mampu bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya inbreeding kedaerahan harus ditekan seminimal mungkin, agar tidak terjadi infleksibilitas pendidikan.